

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1914, Eropa bersiap menghadapi perang besar yang akan melanda benua tersebut untuk pertama kalinya dalam satu abad terakhir. Di tahun itu, dunia menyaksikan pembentukan dua kekuatan besar di Eropa. “Pertama, terdapat blok *Triple Alliance* yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria, yang sebelumnya membentuk *Dual Alliance* pada tahun 1879 dan di kemudian, aliansi tersebut berkembang menjadi *Triple Alliance* ketika Italia bergabung pada tahun 1882” (Keegan, 1998, Hlm.52). Selain itu, terdapat pula blok *Triple Entente* yang merupakan aliansi non formal antara Britania Raya, Perancis, dan Rusia. Kedua kekuatan besar ini saling bersitegang yang mengakibatkan Eropa terjerumus ke dalam berbagai konflik. “Selama periode 1908 hingga 1913, pengeluaran pertahanan dari enam kekuatan utama Eropa meningkat sebesar 50% dalam nilai riil” (Stevenson, 2016, Hlm.42). Hal ini menunjukkan adanya perlombaan persenjataan di antara keenam negara ini, yang semakin memperkeruh suasana yang sudah memanas.

Ketegangan pun memuncak di tanggal 28 Juni 1914 dimana pada saat itu, Franz Ferdinand I serorang Pangeran Agung Austria-Hungaria bersama istrinya yang sedang mengunjungi kota Sarajevo dibunuh oleh Gavirlo Princip seorang anggota kelompok nasionalis Serbia. “Ketika iring-iringan mobil Franz Ferdinand sedang berkeliling kota Sarajevo, Gavirlo Princip diketahui bergegas maju dan menembak dua kali kearah mobil tersebut, dimana Ferdinand dan istrinya Sofhie mengalami luka parah dan tewas tak lama kemudian” (Gilbert, 1994, hlm.16). Pembunuhan ini pada awalnya menimbulkan konflik antara Austria-Hungaria dan Rusia saja, namun mengingat adanya sistem aliansi yang kuat pada saat itu, konflik ini dengan cepat berkembang menjadi perang besar di Eropa yang kini dikenal sebagai Perang Dunia I.

Ketika perang telah dideklarasikan, hampir seluruh negara di Eropa bersiap akan konflik besar ini, tak terkecuali Belanda yang merupakan negara netral pada saat itu. State (2008, hlm. 172) memaparkan bahwa “Belanda bersiap untuk sebuah

serangan dan mengerahkan angkatan bersenjata dengan cepat pada tanggal 31 Juli 1914, mereka adalah negara pertama di Eropa Barat yang melakukan antisipasi serangan besar dan pembangunan kekuatan diperbatasan negaranya”. Di awal Perang, Jerman mengerahkan pasukannya ke barat untuk menundukkan Perancis, demi melakukan hal tersebut dengan cepat maka Jerman menerapkan taktik *Schlieffen plan* dimana mereka harus menginvasi Belgia yang merupakan negara netral agar bisa mendapatkan posisi strategis dan dapat melingkari Perancis sebelum akhirnya dapat menyerang baik dari perbatasan Jerman maupun wilayah Belgia.

“Pada awalnya Jerman berencana untuk memasukan wilayah Belanda bagian selatan ke dalam garis serangannya, namun para ahli strategi Jerman memutuskan bahwa Belanda yang netral dapat membantu Jerman lebih baik lagi dengan tetap membuka jalur perdagangan” (State, 2008, hlm.172). Walau demikian, baik pihak pemerintahan maupun masyarakat Belanda tidak banyak mengetahui fakta tersebut yang akhirnya menimbulkan kepanikan publik bahkan banyak orang yang melakukan penimbunan uang dan makanan ketika Belgia di invasi oleh Jerman.

Sikap netralitas Belanda ini diharapkan tidak terlalu berdampak kepada urusan dalam negerinya dan memastikan Belanda untuk tetap tidak terlibat dalam peperangan. Namun tentu pada kenyataannya, Belanda harus menghadapi berbagai tantangan, krisis dan bencana sebagai bayaran yang mahal untuk tetap menjadi netral di tengah perang besar ini. Abbenhuis (2006) menggambarkan keadaan dan situasi Belanda selama berlangsungnya Perang Dunia I sebagai berikut:

Lebih dari 400.000 pria di usia 20 hingga 40 tahunan diharuskan mengikuti wajib militer dan bergabung menjadi angkatan bersenjata, meninggalkan keluarga dan mata pencaharian mereka. Perang menghambat pengiriman barang-barang vital, sementara penjatahan (*rationing*) bahan bakar dan bahan pangan menjadi semakin umum dan menyesak. Ratusan ribu orang asing baik sipil maupun tentara, mencari perlindungan di negara ini, menghadirkan masalah pengungsi yang sangat besar bagi otoritas Pemerintah Belanda. Pemerintah pun memperkenalkan undang-undang dan peraturan baru, menciptakan distribusi khusus dan biro administrasi, dan menggunakan kekuatan militer untuk menangani hal-hal yang tidak memiliki solusi lain (hlm.17).

Selain itu, kapal-kapal Belanda pun kerap menjadi korban dari kebijakan perang kedua belah pihak, diketahui semenjak berkecambuknya perang pada tahun 1914, tidak sedikit kapal-kapal Belanda yang dihentikan berkali-kali karena dicurigai membawa suplai untuk di kirim ke pihak lawan (Inggris atau Jerman). Hal ini bisa kita lihat dari perlakuan yang dilakukan oleh pihak Inggris kepada kapal-kapal dagang Belanda, Dijk (2007, hlm.127) memaparkan bahwa “dikarenakan perdagangan luar negeri Belanda mencakup transitnya barang-barang dagang Jerman, London memerintahkan untuk melakukan penghentian sementara barang-barang ekspor dari Belanda”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintahan Inggris sangat berhati-hati dalam menerima berbagai barang dari Belanda karena mereka tidak dapat memastikan apakah barang tersebut berasal dari Belanda atau justru musuhnya Jerman.

Dari pihak Etente pun, khususnya Inggris dan Perancis memberlakukan blokade ekonomi penuh bagi Jerman dan Austria-Hungaria di Selat Channel. Demi memberlakukan kebijakan ini maka Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengerahkan kapal perangnya untuk beroperasi di pesisir Dover dan Angkatan Laut Perancis berpatroli di sepanjang selat. “Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada perekonomian Belanda. Para pedagang Netral pun ditangkap dan diarahkan menuju Pelabuhan-Pelabuhan Perancis dan Inggris” (Dijk, 2007, hlm.126).

Di sisi lain, “tujuh kapal dagang yang diberikan jalur aman oleh Jerman di Selat Channel Inggris yang berlayar dari Inggris di torpedo oleh kapal selam (*U-Boat*) pada 24 Pebruari 1917, setelah Jerman mendeklarasikan kebijakan kapal selam tak terbatasnya” (State, 2008, hlm.174). Lalu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak sedikit Masyarakat Belanda pun yang menimbun koin perak di masa tak menentu ini yang memaksa pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijakan denominasi kecil untuk uang kertas. Disisi lain kelaparan pun tidak terhindarkan, di bidang pertanian berbagai sayuran di tanam menggantikan gandum sebagai tanaman pilihan untuk menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh impor makanan, namun pergantian tanaman pangan ini pun gagal. “Sebuah sistem untuk mendistribusi makanan pun diterapkan pada tahun 1916 tetapi kekurangan makanan tetap ada” (State, 2008, hlm. 175). Krisis ini pun memuncak pada tahun 1917

Angkatan Laut Belanda tidak lagi dapat menjamin adanya jalur aman bagi kapal-kapal yang membawa suplai dari Hindia Belanda. Hal tersebut pada akhirnya mengarahkan Belanda untuk melakukan kebijakan penjatahan roti (*bread rationing*) yang mengakibatkan kericuhan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Belanda pada masa 1914 hingga 1918 sedang berada dalam fase yang penuh dengan kericuhan. Banyaknya kericuhan ini menimbulkan kecemasan di masyarakat dan menjadikan Belanda menjadi sebuah negeri yang terlihat tenang dari luar namun memiliki berbagai permasalahan di dalam.

“Walau dengan berbagai permasalahan diatas, bagi Belanda netralitas tidak lebih dari sebuah pertanyaan atas perhitungan militer” (Klinkert, 2019, hlm. 62). Pernyataan tersebut benar rasanya apabila kita melihat dari keadaan Militer Belanda saat itu yang tergolong lemah, lebih baik berada di posisi netral ketimbang terlibat dalam salah satu aliansi yang belum tentu menjamin keamanan negaranya. Namun sejatinya netralitas bukan hanya sekedar permasalahan militer saja, karena untuk menjadi negara yang netral, Belanda harus mempertimbangkan berbagai hal rumit lainnya seperti moral, idealisme, keadaan geopolitik di kawasan maupun internasional, citra diri, integritas teritorial dan hubungan perdagangan. Sejalan dengan ini, Abbenhuis (2006, hlm. 25) berpendapat bahwa “menjadi netral adalah masalah yang kompleks mengingat situasinya yang khas di Eropa dan minat yang kuat dari kekuatan yang sedang berperang dalam kegiatannya”.

Setelah Perang Dunia I berakhir, Belanda memasuki babak yang baru. Kini dengan perang berakhir maka tentunya semua kalangan mengharapkan situasi yang stabil agar perekonomian Belanda setelah tahun 1918 menjadi lebih baik, gerakan modernisasi pun kian marak di temui. “Orang-orang memberikan suaranya untuk partai politik, bergabung menjadi anggota serikat pekerja atau asosiasi karyawan, bermain dalam tim olahraga, mendengarkan stasiun radio dan berpartisipasi dalam klub kejuruan sesuai dengan pillar mereka” (State, 2008, hlm.181).

Dalam kancah Internasional, citra Belanda semakin baik terlebih setelah Belanda menjadi anggota awal Liga Bangsa-Bangsa (LBB). “Meskipun negara ini menjadi anggota LBB, Belanda menegaskan kembali netralitasnya, yang tampaknya telah mendapatkan rasa hormat dari penguasa dan yang dilambangkan

dengan kehadiran Mahkamah Internasional di Den Haag” (Meijer, 2022). Penandatanganan Belanda sebagai anggota LBB ini mendapat sambutan yang beragam dari masyarakat maupun politikus di Belanda, baik yang menyambut secara positif bergabungnya negara ini dengan organisasi itu adapun yang merasa skeptis dengan dibentuknya organisasi LBB ini. Hal tersebut dapat terlihat dari apa yang di tulis surat kabar Het Volk (dalam Donk, 1920) sebagai berikut:

Pemerintahan sebuah negara yang tetap netral berusaha menunjukkan dirinya pada dokumen seperti ini bahwa mereka bermaksud untuk mengambil bagian aktif dalam perkembangan dari organisasi internasional saat ini yang telah menjadi Liga Bangsa-Bangsa yang sesungguhnya. Namun, untuk mewujudkan hal ini, keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik pun harus tetap hidup, dan keyakinan ini nampaknya kurang (hlm. 25).

Memasuki tahun 1930-an Belanda mulai masuk ke dalam keterpurukan. Dalam periode ini Belanda mulai memasuki tekanan krisis ekonomi yang juga menjerat negara-negara Eropa lainnya. “Terdapat perbedaan besar antara orang-orang kaya dan miskin dan negeri ini terbagi menjadi kelompok politik dan agama yang berbeda yang disebut “pilar”” (Dutch Resistance Museum, 2016). Hellemans (2020, hlm.126) pun menjelaskan bahwa “di Belgia di Belanda dan sejumlah negara lain, dunia ini terbagi dan meluas keranah politik (dengan partai politik nasional) dan ranah sosial ekonomi (dengan serikat pekerja dan sejumlah organisasi profesional)”. Pilar-pilar ini merupakan istilah untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ter-segregasi dan merepresentasikan berbagai hal, baik agama, partai politik maupun organisasi sosial. Dalam masyarakat Belanda sendiri terdapat empat pilar yang secara umum dapat ditemukan pada saat itu, diantaranya ialah: pilar Protestan, pilar Katolik, pilar Sosialis dan pilar Liberal.

Di sisi lain, masih di periode yang sama, berbagai surat kabar mengabarkan adanya presekusi kaum Yahudi di Jerman. Salah satunya seperti yang di wartakan oleh The Jewish Record (1937, hlm 12) dimana “Sikap Gereja Katolik terhadap presekusi umat Yahudi di Jerman berpegang kepada keputusan Kantor Suci yang dikeluarkan pada tahun 1928 dimana Gereja secara khusus mengutuk kebencian terhadap mereka”.

Situasi pun semakin memanas karena terdapat berita lainnya yang mengatakan bahwa Eropa akan memasuki perang baru karena manuver agresif Jerman pun juga banyak beredar. Sebagai contoh, Miller (1939, hlm. 6) mengatakan bahwa “di Eropa, Fasisme menggapai puncak kemenangannya selama tahun 1938, para akhir tahun lalu, Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler secara praktis mendominasi dunia lama”. Namun meskipun banyak pemberitaan yang seolah sudah memprediksi bahwa eropa akan masuk pada sebuah konflik besar, masyarakat Belanda saat itu berusaha memposisikan diri sebagai pihak netral agar terhindar dari konflik besar. Mengingat mereka telah berhasil terhindar dari Perang Besar sebelumnya walau harus membayar dengan sangat mahal.

Di sisi lain, Jerman yang merupakan salah satu pemain utama pada Perang Dunia I mengalami berbagai keterpurukan. Di akhir perang, Jerman terpaksa harus menandatangani perjanjian versailles di tahun 1919. Dalam perjanjian tersebut, Jerman harus kehilangan berbagai wilayahnya. Contohnya, di bagian barat, Jerman harus kehilangan wilayahnya kepada Belgia. Selain itu, wilayah Alsace-Lorraine yang kerap menjadi wilayah sengketa antara Perancis dan Jerman pun harus dikembalikan ke pihak Perancis. Seperti yang tertuang pada Artikel 51 dalam Perjanjian Versailles (1919, hlm. 77) yang berbunyi bahwa “wilayah yang diserahkan ke Jerman sesuai dengan *Preliminaries of Peace* yang ditandatangani di Versailles pada 26 Februari 1871, dan Perjanjian Frankfurt 10 Mei 1871, dikembalikan ke kedaulatan Perancis sejak tanggal Gencatan Senjata 11 November 1918”.

Dengan demikian Jerman kehilangan banyak wilayahnya setelah perjanjian ini ditandatangani. Truit (2010, hlm. 114) pun menyatakan bahwa “Jerman kehilangan wilayah seluas 65.000 km² dan sekitar tujuh juta penduduknya dari perjanjian ini. Beban yang harus dipikul Jerman pun tak hanya sekedar kehilangan wilayahnya saja, Jerman juga harus membayar biaya reparasi atau biaya ganti rugi perang untuk kerusakan yang telah diakibatkan dari Perang Dunia I”. tak sampai situ saja, Overy (2010, hlm. 14) menyebutkan bahwa “jumlah akhir yang telah ditetapkan pada bulan Mei 1921 bagi Jerman untuk membayar sebesar 132 milyar

mark emas, dan untuk itu 50 milyar mark harus dibayarkan pada suku 2 milyar mark per tahun”.

Untuk memastikan agar Jerman tidak lagi menjadi negara agresif, perjanjian ini pun mengharuskan Jerman menyerahkan kedaulatan koloni-koloninya kepada LBB. Bahkan pada Artikel 159 dan Artikel 160 Perjanjian Versailles (Dalam Tanpa. Nama 1919, hlm. 115) pun menyebutkan bahwa “Jerman harus medemobilisasikan kekuatan militernya juga mendapatkan pembatasan kekuatan militer yang mana Jerman tidak boleh memiliki tentara yang beranggotakan lebih dari 100.000 prajurit yang terdiri dari tujuh Divisi Infanteri dan tiga Divisi Kavaleri”. Bahkan setelah perjanjian Versailles tersebut, Jerman memasuki masa ketidakstabilan dengan kondisi yang memalukan. Kondisi memalukan tersebut selain dikarenakan kekalahan militer Jerman dalam Perang Dunia I juga lemahnya pemerintahan dalam menghadapi berbagai krisis setelah perang. Alhasil Jerman pun tidak dapat menghindari hiperinflasi di awal tahun 1920-an yang merupakan dampak dari Depresi Pasca Perang Besar di Amerika Serikat. “Pada tahun 1923, inflasi mencapai puncaknya di mana nilai mata uang Mark Jerman sangat merosot. Dalam perbandingan tersebut, satu *US Dollar* bisa digunakan untuk membeli 4 triliun Mark Jerman”. (Pegg, 1956, hlm. 81).

Berbagai permasalahan yang muncul akibat krisis ekonomi pasca perang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Republik Weimar. Masyarakat membutuhkan sosok pimpinan yang kuat dan mampu membawa Jerman keluar dari krisis tersebut. Pada saat itulah, Hitler sebagai seorang Pemimpin Partai National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) atau yang lebih dikenal Nazi pun maju menjadi kandidat pemimpin Weimar karena melihat keadaan Jerman yang sangat buruk di bawah pemerintahan Republik Weimar yang sedang menjabat.

“Di tahun 1923, Hitler yang gemas melihat keadaan negaranya yang kala itu kacau diperintah Republik Weimar melancarkan semacam pemberontakan (*putch*)” (Ojong, 2008, hlm. XXIX). Pemberontakan tersebut dikenal sebagai *Bierkeller Putsch* atau *Beerhall Keller*. Pemberontakan itu pun pada akhirnya gagal dan seluruh Pimpinan Nazi ditahan di penjara Landsberg selama lima tahun namun pada

kenyataannya penahanan itu hanya berlangsung selama sembilan bulan. Setelah melewati masa-masa sulit itu awal tahun 1920an, Jerman kembali ditimpa oleh musibah. “Di Amerika Serikat, harga berbagai saham turun secara dratis di tahun 1929, peristiwa yang disebut depresi besar tersebut berdampak pada berbagai negara tak terkecuali Jerman. Di Jerman sendiri pada periode 1930-1932 tingkat pengangguran mencapai 33%” (Ojong. 2008, hlm. XXIX).

Hal tersebut pun digunakan oleh Hitler yang baru keluar dari penjara untuk memanfaatkan keadaan dalam meraih suara dan dukungan bagi ia dan partainya. Partai Nazi menjanjikan pekerjaan, roti, kehidupan dan perekonomian yang lebih baik apabila dapat memenangkan pemilihan umum tahun 1933 mendatang. Dengan demikian, banyak masyarakat Jerman yang memberikan kepercayaan mereka pada partai Nazi karena menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Namun, pada kenyataannya “pemberian suara pada Hitler kerap dianggap sebagai usaha terakhir oleh masyarakat sebagai sebuah protes kepada kegagalan dari partai lain” (Overy, 2010, hlm.53). Dari pemilu tersebut, Nazi hanya memperoleh 288 suara dari total 647 suara, sehingga Nazi tidak mendapat suara mayoritas untuk memerintah secara tunggal. Dengan demikian Hitler akan memimpin Pemerintahan Koalisi yang dibentuk dari Partai Nazi dan Partai *Deutschnationale Volkspartei* (DNVP), yang selanjutnya Hidenburg selaku Presiden Jerman kala itu menunjuk Hitler sebagai Kanselir Jerman. “Pada pukul 11.30 Adolf Hitler memberikan sumpah dimana ia berjanji untuk membela dan menegakkan konstitusi” (Overy, 2010, hlm.63). Sejak saat itulah Hitler menjadi Kanselir baru bagi Republik Weimar.

Pada tahun 1934, Hidenburg meninggal dunia dan jabatan Hitler pun di rangkap sebagai Presiden dan Kanselir, sejak saat inilah ia menyebut dirinya sebagai Pemimpin (Führer) bagi Jerman. Selama masa pemerintahannya sebelum Perang Dunia II dimulai, “Hitler melakukan berbagai manuver agresif di Eropa seperti yang terjadi di tahun 1938 di mana Jerman menganeksasi Austria dan mulai mengklaim wilayah Sudetenland di bagian barat Cekoslovakia seperti yang diberitakan” (Mudd, 1938, hlm.3). dimana Perhatian dunia telah tertuju pada Sudetenland, sebuah wilayah kecil di Cekoslovakia, di mana Adolf Hitler memicu krisis dunia dengan mengklaim bahwa karakteristik Jermanik wilayah itu

mewajibkan negaranya untuk mengambil alih wilayah tersebut. Lalu di tahun 1939, Jerman mengirimkan ultimatum kepada Lithuania untuk menyerahkan wilayah *Memelland* yang dahulunya merupakan teritori Jerman. “Hal tersebut berujung kepada Jerman dan Lithuania mencapai kesepakatan untuk menyatukan kembali provinsi yang hilang karena perang tersebut” (Associated Press. 1939, hlm.1)

Tak sampai disitu, Jerman kemudian melakukan permintaan lainnya untuk menyerahkan kota bebas Danzig, hal ini pun membuat Inggris dan Perancis memutuskan untuk mendukung Polandia dalam mempertahankan kemerdekaannya. MacMillain (1939, hlm. 3) mengabarkan bahwa “kampanye Adolf Hitler di Danzig tampaknya menciptakan keraguan di Paris dan London dalam pertanyaan vital mengenai keadaan Polandia dapat dijadikan justifikasi dalam mengambil tindakan militer”. Tak lama setelah Inggris dan Perancis bersumpah kepada Polandia, “Jerman dan Italia meresmikan aliansi mereka yang dikenal dengan pakta baja (*Steel Pact*)” (Dear dan Foot, 2002, hlm. 234).

Weinberg (2014, hlm.32) mengungkapkan, “segera setelah Hitler sadar bahwa ia tidak dapat memisahkan kekuatan barat dari Polandia, ia memerintahkan untuk memulai perang”. Pada akhirnya di tanggal 1 September 1939, Jerman pun mulai untuk menginvasi Polandia demi memperoleh wilayah lainnya yang akan digunakan sebagai bagian dari *Lebensraum* (Ruang hidup) Jerman. “Jerman menginvasi Polandia setelah melakukan beberapa insiden perbatasan palsu sebagai alasan untuk menginvasi” (Evans, 2008, hlm.1). Namun, Tindakan agresif Jerman ini tidak hanya berhenti sampai Polandia saja, karena satu tahun kemudian tepatnya di tahun 1940, Belanda pun harus ikut jatuh ke tangan Jerman ketika Jerman melancarkan operasi *Fall Gelb*-nya demi menguasai wilayah negeri bawah.

Menurut Mayor Rick S. Richardson dalam Richardson (1999, hlm. 23), “penguasaan Nazi Jerman atas Belanda ini bertujuan untuk mendirikan basis–basis militer demi mewujudkan situasi yang menguntungkan untuk dilakukannya penyerangan terhadap Inggris dan Perancis di darat dan di udara”. Demi terciptanya situasi yang menguntungkan tersebut, Jerman sebagai negara yang berhasil menguasai negeri bawah (dalam hal ini Belanda) harus segera membentuk suatu pemerintahan pendudukan agar dapat mengontrol dan mengkoordinasi masyarakat

Belanda sehingga sumber daya manusia ini bisa digunakan untuk berbagai bagi kepentingan Jerman itu sendiri. Baik di dalam maupun diluar wilayah Belanda.

Terlebih, Moore (1991, hlm. 114) menjelaskan bahwa “Nazi Jerman memanfaatkan partai fasis yang telah ada di Belanda, yaitu *Nationaal – Socialistische Beweging in Nederland* (NSB), sebagai instrumen pemerintahan pendudukan Nazi Jerman di Belanda”. Pada awal – awal pemerintahan pendudukan, Jerman sebisa mungkin meminimalisir pengaruhnya dalam bidang ekonomi sehingga tidak menimbulkan gerakan pemberontakan yang dapat mengganggu jalannya usaha Jerman dalam mengalahkan Inggris dan Perancis.

Moore (1991, hlm. 114) pun menambahkan bahwa “respon dari masyarakat Belanda sendiri terhadap pendudukan Jerman bermacam–macam sesuai dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari kondisi pendudukan tersebut”. Artinya bagi kelompok yang tidak mengalami kerugian akan bersikap netral begitu juga kelompok yang mengalami keuntungan akan berkolaboratif. Akan tetapi, di lain sisi tentunya kelompok-kelompok yang mengalami kerugian akan sangat aktif menentang pendudukan atau pendudukan Jerman ini baik secara terbuka maupun secara sembunyi – sembunyi. Oleh karena itu, ketika pada masa–masa awal pendudukan Jerman di Belanda, mayoritas masyarakat bersikap netral dikarenakan relatif sedikitnya pihak pemerintahan pendudukan Jerman mencampuri urusan ekonomi dan sosial masyarakat Belanda. Akan tetapi, ketika dilakukannya persekusi umat Yahudi di Belanda dan seiring dengan ditekankannya ideologi nasional sosialis ke dalam masyarakat Belanda serta peningkatan kuota bagi pabrik – pabrik produksi Belanda untuk memenuhi kebutuhan perang Jerman, sikap masyarakat Belanda secara perlahan–lahan berubah menjadi aksi perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jerman.

Dari pemahaman mengenai keadaan dan situasi tersebut, menarik rasanya apabila pembahasan terkait peristiwa pendudukan Belanda oleh Jerman ini di bahas lebih lanjut, terutama peristiwa terkait hal kolaborasi dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Belanda antara tahun 1940 hingga 1945. Terdapat berbagai buku dan bacaan yang membahas mengenai bagaimana Jerman menyerang Perancis melalui negara *Benelux* bahkan cukup lengkap hingga berbagai operasi

yang dijalankan di sana. Namun buku-buku yang membahas mengenai masuknya Jerman ke Belanda dan apa yang mereka lakukan disana masih sedikit ditemui. Hal ini lah yang mendasari latar belakang dibuatnya skripsi ini, terlebih rasa kaingin tahuan terkait apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan apa yang masyarakat Belanda rasakan selama masa pendudukan Jerman.

Meskipun sudah terdapat beberapa buku bacaan yang membahas Tindakan kolaborasi dan perlawanan masyarakat Belanda kala itu, namun penting rasanya untuk membuat sebuah tulisan yang mencakup latar belakang jatuhnya negeri ini ke tangan Jerman dan dampaknya terhadap masyarakat Belanda. Apalagi hal yang berkaitan dengan munculnya tindakan kolaborasi dan perlawanan secara menyeluruh, mulai dari tahun 1940 hingga 1945. Lebih lanjut, muncul pertanyaan mengapa Belanda, sebuah negara yang berhasil tetap netral di Perang Dunia I dan sekaligus penguasa Hindia Belanda, menjadi sasaran ekspansi Jerman di front Barat.

Fakta bahwa organisasi seperti NSB bisa hadir di tengah masyarakat Belanda dan Hindia Belanda memberikan petunjuk kepada Penulis bahwa terdapat kolaborator di Belanda yang dengan suka rela berpihak dan membantu rezim pendudukan Jerman. Namun apakah semua masyarakat Belanda pada saat itu menerima dan bekerja sama begitu saja dengan pihak yang menyerang dan menduduki negeri nya itu?

Topik ini jelas membuka peluang untuk memahami dinamika kolonialisme dan Perang Dunia II dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, topik ini pun memiliki relevansi yang kuat dengan masa kini, di mana keadaan dunia saat ini sedang dipenuhi oleh berbagai macam konflik dan perubahan geopolitik yang sangat mempengaruhi masyarakat suatu negara. Dengan mempelajari dan memahami bagaimana masyarakat Belanda merespons pendudukan Jerman dan bagaimana mereka melawannya, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga tentang bagaimana masyarakat suatu negara atau daerah merespons tekanan eksternal dan tantangan politik. Terakhir, penulisan skripsi ini jelas akan membantu mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan yang sangat berharga untuk masa depan karier akademik dan profesional.

Dengan mengetahui situasi dan keadaan yang telah disampaikan tersebut, maka penelitian tentang keadaan dan respon Masyarakat Belanda di masa Perang Dunia II akan dituangkan ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul “Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Pada Masa Pendudukan Jerman (1940-1945)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan terkait keadaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan Skripsi secara utuh sebagai syarat kelulusan dari Program Studi S1 Pendidikan Sejarah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pokok yang dapat di rumuskan yaitu “Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Pada Masa Pendudukan Jerman (1940 – 1945)”. Adapun rumusan masalah tersebut dapat terbagi ke dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Jerman menduduki Belanda pada tahun 1940?
2. Apa yang dilakukan pemerintahan pendudukan Jerman di Belanda selama masa pendudukan tersebut (1942-1945)?
3. Apa saja bentuk kolaborasi masyarakat Belanda dengan pemerintahan Jerman selama masa pendudukan berlangsung (1942-1945)?
4. Apa saja bentuk perlawanan masyarakat Belanda terhadap pemerintahan Jerman selama masa pendudukan berlangsung (1940-1945)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dengan menimbang rumusan masalah di atas, maka diharapkan tujuan penelitian yang dapat dicapai dalam penelitian ini berupa:

1. Menjelaskan faktor-faktor didudukinya Belanda oleh Jerman di tahun 1940.
2. Mendeskripsikan keterlibatan Jerman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Belanda selama masa pendudukan (1940-1945).

3. Mendeskripsikan respon masyarakat Belanda dalam hal kolaborasi bersama pemerintahan Jerman selama masa pendudukan berlangsung. (1940-1945).
4. Mendeskripsikan perlawanan masyarakat Belanda terhadap pemerintahan Jerman selama masa pendudukan berlangsung. (1940-1945).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini sebagai Peneliti dan untuk Pembaca terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya penulisan sejarah dalam tema Sejarah Eropa, khususnya pada pembahasan mengenai keadaan Belanda selama masa pendudukan Jerman.
2. Memberikan sudut pandang baru dan gambaran akan kehidupan masyarakat Belanda selama berada di bawah pemerintahan pendudukan Jerman dari tahun 1940 hingga tahun 1945.
3. Dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dalam ruang lingkup yang lebih luas juga mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini digunakan oleh Peneliti sebagai Mahasiswa Pendidikan Sejarah untuk memenuhi syarat kelulusan pada Studi S1 yang sedang ditempuh.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sudut pandang lain dalam melihat keadaan Belanda selama masa Perang Dunia II khususnya terkait keterlibatan kolaborator dan perlawanan yang dilakukan masyarakat Belanda pada Pemerintahan Jerman.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk memperluas materi mata pelajaran Sejarah kelas XI SMA dalam kurikulum 2013 revisi. Hal ini pun sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dimana pada kompetensi dasar 3.6 siswa diharapkan menganalisis

pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global (LBB dan PBB). Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasannya terhadap keadaan masyarakat Belanda sebelum dan semasa Perang Dunia II.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian ini mengadopsi sistematika penulisan yang didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 mengenai Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019. Sistematika tersebut terdiri dari lima bab yang mencakup berbagai aspek. Di dalam Bab I, atau Bab pendahuluan, memaparkan latar belakang penelitian yang mencakup kaingin tahun pribadi penulis terkait dan seputar keadaan Negeri Belanda sebelum dan sesudah Perang Dunia I. Ketertarikan pada keadaan ini pada dasarnya adalah langkah pertama penulis dalam memahami situasi dan kondisi Belanda yang netral saat Perang Dunia I juga terkait isu-isu yang dihadapi masyarakat Belanda setelah perang berakhir. Di lain sisi penulis pun melakukan eksplorasi terkait situasi dan kondisi Jerman di masa yang sama agar penulis memiliki gambaran, dan memahami latar belakang politik, sosial juga ekoomi yang mempengaruhi hubungan kedua negara ini hingga faktor penyebab penyerangan Jerman ke Belanda.

Lalu pada Bab II atau Bab kajian teori penulis membahas konsep dan teori yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Konsep dan teori yang akan penulis pakai ialah konsep-konsep dan teori relevan, maka dari itu penulis akan mencari berbagai konsep dan teori yang berhubungan erat dengan politik dan sosial. Dalam hal ini, konsep yang akan penulis gunakan adalah:

Pertama konsep terkait perlawanan dan kolaborasi. Disini penulis melihat kedua konsep ini sebagai aspek utama dalam penelitian penulis terkait pendudukan Jerman di Belanda ini. Harapannya penulis dapat menggunakan konsep ini dalam menjawab bagaimana strategi, dan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat Belanda juga peran kolaborator dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi sebagian masyarakat Belanda dengan rezim pendudukan Jerman. Dalam bahasannya terkait

perlawanan dan kolaborasi ini, penulis menggunakan beberapa buku yang diantaranya adalah buku karya sejarawan Belanda Louis de Jong dan Werner Rings.

Buku yang berjudul *The Netherlands and Nazi Germany* karya Louis de Jong ini menggambarkan suasana dan keadaan sehari-hari masyarakat Belanda khususnya komunitas Yahudi, karena memang fokus pembahasan buku ini adalah terkait keadaan komunitas Yahudi di Belanda saat masa pendudukan dan aktifitas perlawanan yang dilakukan masyarakat Belanda pada saat itu. Sedangkan untuk buku yang berjudul *Life with the Enemy: Collaboration and Resistance in Hitler's Europe 1939 – 1945* karya Werner Rings ini membahas terkait apa saja bentuk-bentuk kolaborasi dan perlawanan masyarakat Eropa ketika negerinya sedang diduduki oleh Jerman selama Perang Dunia II.

Kedua ialah pendudukan atau okupasi, dimana penulis berharap dengan konsep ini penulis dapat menjawab terkait apa itu pendudukan, bagaimana mekanisme dan dinamika hubungan antara masyarakat Belanda sebagai penduduk dengan para kolaborator juga orang-orang Jerman yang dianggap sebagai penjajah. Disini, terkait pembahasan mengenai konsep pendudukan atau okupasi penulis mengacu pada tulisan karya Endelstein (2004) yang berjudul *Occupational Hazard: Why Military Occupation Succeed or Fail* dan juga karya Nabulsi (1999) yang berjudul *Tradition of War: Occupation, Resistance and the Law*.

Ketiga adalah pada Bab II ini penulis pun sedikit membahas mengenai berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan secara langsung maupun tidak terkait invasi dan pendudukan Jerman di Eropa serta setidaknya berbagai bacaan menyinggung penggambaran atau situasi sebuah negara yang diduduki oleh Jerman. Pada bagian penulis membagi penelitian terdahulu menjadi dua bagian, yaitu bagian skripsi serta bagian artikel jurnal dan buku.

Adapun selanjutnya ialah Bab III yang meliputi metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan pun merupakan metode penelitian historis dimana dalam metode tersebut terdapat beberapa tahapan berupa: Heuristik yang merupakan pengumpulan dan pemilihan data, Verifikasi atau kritik sumber atas data-data yang telah berhasil di kumpulkan, Interpretasi sebagai upaya penafsiran data-data yang sudah penulis pilih dan verifikasi, serta Historiografi

sebagai usaha penulis untuk menyajikan dan menjelaskan hasil dari penelitian terkait pendudukan Belanda ini.

Bab IV sendiri merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Dalam Bab IV inilah penulis akan menyajikan pembahasan terkait “Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Pada Masa Pendudukan Jerman (1940 – 1945)”. Bab IV atau Bab pembahasan ini akan terbagi menjadi empat sub-bab agar penulis dapat menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada Bab I. Adapun pembahasan dalam sub-bab ini adalah terkait faktor-faktor penyebab Belanda dapat diserang dan diduduki oleh Jerman pada tahun 1940, apa saja yang dilakukan oleh Jerman selama menduduki Belanda, apa saja bentuk kolaborasi masyarakat Belanda selama masa pendudukan dan bagaimana masyarakat Belanda merespon pendudukan ini dengan perlawanan. Selain itu, pada bab ini pun penulis menggambarkan secara menyeluruh hasil penemuan dan analisis peristiwa ini dengan memanfaatkan konsep-konsep dan teori yang relevan tanpa mengubah keakuratan fakta-fakta dan sumber sejarah yang ada.

Terakhir pada Bab V atau Bab penutup, penulis memaparkan kesimpulan terkait pembahasan pada Bab IV, dalam Bab ini pun penulis memberikan saran kepada pembaca agar dapat menarik manfaat dari tulisan ini serta bagi yang akan melakukan penelitian sejenis agar dapat meneliti lebih dalam dan hal-hal yang belum sempat dibahas oleh penelitian ini.